



Pesimistis Pembangunan DKI

Dampak Telatnya Pengesahan APBD DKI Jakarta 2015

SEJUMLAH pihak pesimistis pembangunan di Jakarta bakal berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu terkait dengan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI lantaran kisruh berkepanjangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan DPRD Jakarta ■

Proyek Terdampak APBD 2015 Molor



Infrastruktur

1. Proyek pembuatan jalan layang busway Tendean-Ciledug sepanjang 9,3 kilometer dengan nilai proyek Rp 2,5 triliun.
2. Pembebasan lahan untuk enam ruas tol dalam kota senilai Rp 3 triliun.
3. Proyek bidang simpang dan jalan tak sebidang Rp 892,05 miliar.
4. Bidang pemeliharaan bina marga Rp 235,6 miliar.
5. Bidang kelengkapan prasarana jalan dan iaringan utilitas Rp 102,075 miliar.



Penanganan Banjir

Normalisasi waduk dan sungai sebagai program penanggulangan banjir Rp 3 triliun.



Transportasi

1. Penyertaan modal kepada PT Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 4,62 triliun.
2. PSO untuk bus Transjakarta senilai Rp 980 miliar.
3. Terlambatnya penyertaan modal Rp 300 miliar untuk PT Transjakarta



Kesehatan

Anggaran untuk Kartu Jakarta Sehat Rp 1,3 triliun.



Pendidikan

1. Kartu Jakarta Pintar Rp 3 triliun.
2. Terganggunya perbaikan 212 gedung sekolah se-Jakarta Rp 1,3 triliun.
3. Anggaran untuk Persatuan Guru Republik Indonesia Rp1,8 miliar.

Lainnya

Pembayaran listrik, telepon dan internet untuk 158 instansi pemerintahan DKI menunggak Rp 158 miliar.

"Sulit mengharapkan pembangunan bisa berjalan normal dengan terlambatnya pengesahan APBD 2015," ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), kemarin (9/4). Uchok juga mengatakan, keterlambatan lebih dari empat bulan pengesahan APBD DKI 2015 pasti mengganggu berbagai program pembangunan yang telah dirancang lantaran keterbatasan waktu.

Apalagi, sisa waktu tahun 2015 hanya tinggal delapan bulan. "Belum lagi kalau pengesahan APBD 2015 kembali terlambat. Apalagi hingga pertengahan April ini juga belum juga disahkan. Dilihat dari sisi manapun,

sulit mengharapkan pembangunan berjalan normal di Jakarta," ucapnya juga kepada koran ini, kemarin (9/4).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budihartono menjamin pembangunan Kota Jakarta tidak akan terlambat meskipun APBD DKI 2015 baru akan disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pada 10 April dan baru dicairkan pada 20 April mendatang. "Saya jamin pembangunan akan berlangsung tepat waktu. Tidak ada yang terlambat dan terhambat," terangnya.

Sebab, ujarnya juga, Badan Unit Layanan Pelayanan Barang dan Jasa (BULP) DKI Jakarta

telah meminta kepada Gubernur DKI agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang memiliki program pembangunan infrastruktur yang besar

menyediakan dokumen lelang. Setelah dokumen lelang tersebut selesai, maka akan langsung diteliti oleh BULP DKI Jakarta. Bila sudah memenuhi syarat dari pelaksanaan proses lelang, maka dokumen itu langsung memasuki tahap lelang.

"Setelah meneliti berkas-berkas dokumen lelang, dan sudah oke, maka proyek itu siap dilelang. Maka, ketika Kemendagri mengetuk palu mengesahkan Pergub APBD DKI 2015, maka lelang itu langsung dilaksanakan. Jadi begitu diketok langsung ja-

lan," jelas juga mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.

Diungkapkannya juga, selama tiga bulan ini, BULP DKI sudah mencuri start untuk pelaksanaan lelang melalui *e-budgeting*. Sehingga, saat APBD DKI 2015 sudah bisa digunakan, tidak perlu lagi menunggu proses lelang yang memakan waktu yang biasanya berjalan hingga tiga bulan tersebut.

"Jadi BULP DKI mencuri start. Semua SKPD sudah dipanggilin untuk segera menyiapkan berkas dokumen lelang dan dilakukan penelitian berkas. Kontrak ini sudah berlaku apabila APBD sudah diketok. SKPD-SKPD yang besar sudah siap melakukannya," ungkapnyanya juga PNS senior tersebut.

Untuk diketahui, seharusnya APBD DKI 2015 sudah bisa digunakan pada akhir atau awal Februari 2015 sejak disahkan dalam Paripurna Penetapan APBD DKI 2015 pada 27 Januari 2015 lalu. Namun, karena ada perseteruan antara asli atau tidaknya dokumen RAPBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri antara DPRD DKI dan Pemprov DKI, maka penetapan APBD 2015 terkatung-katung.

Bahkan, kalangan DPRD DKI mengajukan hak angket untuk menyelidiki pengiriman APBD DKI 2015 ke Kemendagri tersebut. Akhirnya, DPRD DKI menetapkan penggunaan anggaran tahun 2015 melalui pergub bukan melalui peraturan daerah (perda) yang lazimnya di-



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

gunakan.

Kemudian Kemendagri menjanjikan pada 10 April 2015, APBD DKI 2015 sudah akan disahkan dan selang 10 hari kemudian anggaran itu dapat dicairkan penggunaannya. Akibatnya perseteruan yang tidak berkesudahan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI itu membuat pembangunan di Jakarta yang seharusnya sudah mulai dilakukan sejak Januari, hingga pekan pertama April belum bisa dilaksanakan satu pun. Lantaran APBD 2015 tak kunjung disahkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan pelaku usaha turut andil dalam 'kue' belanja pemerintah yang berasal dari APBD. Memasuki kuartal I/2015 ini, APBD DKI belum dapat dibelanjakan sesuai alokasinya. Sehingga, pelaku usaha yang tergantung proyek-proyek Pemprov DKI akan terdampak.

"Kondisi ini juga akan berdampak pada kelangsungan lebih kurang 7.500 perusahaan rekanan Pemprov DKI Jakarta yang selama ini bergantung pada proyek-proyek pemda," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima INDOPOS beberapa waktu lalu. Mundurnya pengesahan APBD 2015, kata Sarman, menyebabkan waktu penggunaan anggaran semakin terbatas. Hal itu akan berimplikasi pada rendahnya penyerapan anggaran. (wok)